

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pers sebagai lembaga sosial diakui menjadi alat komunikasi bagi pemerintahan dan merupakan salah satu alat demokratisasi yang cukup efektif. Pers menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan-kepentingan baik vertikal maupun horizontal, pers juga menjadi bagian untuk mempertemukan rakyat dan penguasa. Bahkan menurut Muhtadi (2008: 146) kebebasan pers sering menjadi salah satu ukuran apakah suatu negara telah menganut sistem demokrasi atau tidak. Tidak heran jika di negara-negara maju, pemanfaatan pers dalam proses politik hampir selalu mendapat porsi yang sangat besar. Karena itu pula pers kemudian menjadi kekuatan keempat (*the fourth estate*) yang tidak bisa diabaikan dalam tatanan sosial politik suatu negara.

Kebebasan pers Indonesia sudah diatur dan dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang”. Hal itu dikuatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 1999. Dalam pasal 4 undang-undang tersebut dengan tegas disebutkan, (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran; (3) untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan

informasi; dan (4) dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Seperti yang dikatakan dalam buku *Melawan Hegemoni Media* (Darsono dkk, 2010:43) bicara kebebasan pers akan bicara korban yang harus direlakan sebagai tumbal kebebasan yang masih menjadi barang langka di negeri ini. Seakan tidak pernah berhenti kebebasan pers terus mengalami pelecehan. Profesi jurnalis adalah profesi yang memiliki tingkat kerawanan terhadap keamanan yang tinggi. Dibalik kontribusi yang tidak ternilai, penghargaan atas jerih payah para kuli tinta yang setiap kerjanya senantiasa memakai kaca mata hati ini, tidak sedikit ancaman yang ditelorkan terhadap para jurnalis, baik ancaman dari segi finansial maupun ancaman terhadap nyawa dan terkadang keluarga turut menjadi korban dari perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran.

Memang sangat sulit untuk pers melepaskan kungkungan sistem sebuah rezim. Seperti yang dikatakan Darsono dkk (2011:45) dimana pun pers berada, dimana pun pers hidup, pers tidak bisa melepaskan diri dari sistem yang sedang berkuasa. Ini terbukti dari perjalanan pers Indonesia. Jika dirangkai kejadian demi kejadian yang menimpa kebebasan pers, semakin menambah suramnya masa depan kebebasan pers yang katanya pasca Orde Baru sudah terlahir kebebasan yang fitrah. Hidup matinya sangat bergantung pada tangan-tangan rezimnya.

Dikutip dari Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 1 Januari 2011 yang diakses pada 1 Februari 2019 pukul 12:26 WIB, kehadiran kemerdekaan pers dapat memperkokoh masyarakat dan penguasa sehingga terhindar dari kebobrokan yang pada gilirannya menyebabkan kejatuhannya. Faktanya, faktor

utama yang menyebabkan tumbangya Orde Baru adalah terlalu banyaknya kebobrokan pemerintah, seperti banyaknya hutang luar negeri Indonesia, tingginya tingkat korupsi, macetnya peran lembaga demokrasi seperti legislatif, termasuk dibelenggunya kemerdekaan pers.

Seiring dengan perlombaan politik Pemilihan Umum Presiden pada 17 April 2019. Berbarengan dengan itu, berakhirnya masa jabatan kepemimpinan menjadi sarana untuk mengevaluasi bagaimana kebebasan pers pada rezim tersebut. Selanjutnya bagaimana nasib kebebasan pers era Jokowi pada pilpres 2019?

Indonesia menjadi tuan Rumah *World Press Freedom Day* (WPFDD) pada pelaksanaan Hari Kebebasan Pers Dunia pada 5 Mei 2017 di JCC, Senayan, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Dikutip dari news.detik.com dalam pidatonya Jokowi mengatakan :

Selamat datang di Indonesia, rumah dari jurnalisme paling bebas dan paling bergairah di seluruh dunia. Karena sejak era reformasi, pers yang bebas dan bergairah telah memainkan peran yang kritis, memerangi korupsi, dan tetap menghibur kita semua. Hari ini jurnalisme mendapat tantangan yang besar berupa *hoax*, berita palsu, dan ujaran kebencian. Komentator berkata, dunia akan berakhir. Kepada mereka saya berkata, kamu terlalu muda untuk mengingat (masa lalu). Kita akan mengatasinya. Kita telah melakukannya sebelumnya, dan kita harus melakukannya lagi (mengatasi masalah). Wartawan ini sudah mendapat kebebasan yang amat sangat di dunia, terutama di Indonesia, sebagai bagian dari cita-cita reformasi dulu. Tapi yang namanya kebebasan juga ada tanggung jawabnya.

Namun kenyataannya, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan dalam 10 tahun terakhir. Sebagaimana yang telah dipublikasikan di laman aji.or.id yang diakses pada 6 Februari 2019 pukul 14:32, di Indonesia dalam kebebasan pers dan berekspresi

terbaru menurut data *World Press Freedom Index 2016* yang dirilis *Reporters Sans Frontiers* atau *Reporter Without Borders*, organisasi pemantau media yang berbasis di Paris pada tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 124 dari 180 negara. Dengan peringkat yang sama dengan tahun lalu itu, maka posisi Indonesia berada di papan bawah. Dalam pemeringkatan yang dilakukan *Reporter Without Borders*, ada tiga aspek yang menjadi tolak ukur dalam menilai kondisi kebebasan pers sebuah negara. Masing-masing: iklim hukum, iklim politik, dan iklim ekonomi. Iklim hukum menyoroti aspek regulasi sebuah negara terhadap kebebasan pers. Sedangkan aspek politik menyoroti kebijakan yang berdampak terhadap kebebasan pers. Iklim ekonomi menyorot lingkungan ekonomi negara yang berdampak pada kebebasan pers.

Salah satu indikator utama untuk memotret situasi kebebasan pers di Indonesia adalah dari jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media. Seperti yang tertulis dalam laman aji.or.id yang diakses pada 6 Februari 2019 pukul 14:21 WIB menyebutkan kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2014 hingga 2018 cenderung meningkat. Dimana tahun 2014 sebanyak 40 kasus, 2015 sebanyak 42 kasus, 2016 sebanyak 81 kasus, 2017 sebanyak 60 kasus, dan 2018 sebanyak 64 kasus. Jika dilihat dari indeks angka kekerasan terhadap jurnalis dari tahun 2009 (Rezim Susilo Bambang Yudhoyono) hingga 2018 (Rezim Jokowi) maka perbandingannya cukup signifikan. Pada pemerintahan SBY angka kekerasan jurnalis berkisar dari 38 hingga 56 kasus, itu artinya angka kekerasan terhadap jurnalis yang pada masa pemerintahan Jokowi meningkat tajam.

Fenomena yang mengkhawatirkan dari kebebasan pers ini diperparah dengan para pemilik modal dan kelompok kepentingan yang melakukan intervensi terhadap redaksi. Pers terkadang dijadikan alat oleh pemiliknya untuk kepentingan politik dan ekonomi. Dalam kumparan.com, Hersubeno Arief konsultan media dan politik menyatakan:

Kooptasi dan tekanan hukum oleh penguasa, sikap partisan para pemilik media dan wartawan, serta hilangnya idealisme di kalangan para pengelola media dan wartawan membuat mereka tanpa sadar melakukan ‘bunuh diri’ secara massal. Pers Indonesia memasuki masa gawat darurat! Tanda-tanda pers Indonesia sedang melakukan bunuh diri massal semakin nyata. Pemberitaan media massa tentang Reuni 212 yang berlangsung di Monas Ahad (2/12), membuka tabir yang selama ini coba ditutup-tutupi. Kooptasi penguasa, kepentingan ideologi, politik dan bisnis membuat pers menerapkan dua rumus baku, *framing*, dan *black out*. Peristiwa besar yang menjadi sororan media-media internasional itu sama sekali tidak “menarik” dan tidak layak berita bagi sebagian besar media nasional yang terbit di Jakarta. Reuni 212 terlalu besar untuk dihilangkan begitu saja. Berkumpulnya jutaan orang dari berbagai penjuru kota di Indonesia jelas merupakan berita besar. Tidak ada alasan untuk tidak memuat, apalagi mengabaikannya.

Tidak sampai sana, fenomena yang tidak asing bagi para pemilik media yaitu keberpihakan terhadap Pemilu, hal tersebut dapat mengancam independensi ruang redaksi. Sangat sulit bagi wartawan untuk memastikan tidak ada pengaruh dari para pemilik media ke ruang redaksi, karena kebijakan redaksi pasti dikendalikan para pemilik. Kedekatan pemilik media dengan sebuah rezim menjadikan keberimbangan dan independensi berita diragukan. Meski keterlibatan pemilik media dalam politik adalah hal yang wajar. Namun, menjadikan berita ‘berat sebelah’ dapat merugikan publik dan hilangnya fungsi kontrol terhadap penguasa. Akhirnya berdampak kepada masyarakat yang sudah merasakan hilangnya kepercayaan atas informasi yang didapat melalui media elektronik.

Melihat fenomena tersebut jelas bahwa kebebasan pers pada rezim Jokowi masih sangat buram, fakta tersebut sangat berlainan dengan apa yang disampaikan dalam pidato Jokowi pada Hari Kebebasan Pers Dunia. Terkait dengan kasus tersebut, sebagaimana yang diterangkan dalam laman dewanpers.or.id, organisasi wartawan adalah lembaga yang memiliki mandat untuk mendukung Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 yang di dalamnya terkandung prinsip kemerdekaan pers. Salah satu organisasi wartawan yang telah diakui Dewan Pers adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Perjuangan untuk mempertahankan kebebasan pers merupakan pekerjaan rumah utama AJI. Hal tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk peneliti melakukan penelitian tersebut.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian mengenai kebebasan pers pada era Jokowi dalam perspektif wartawan.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus diatas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman wartawan AJI mengenai kebebasan pers pada era Jokowi?
2. Bagaimana pemaknaan wartawan AJI mengenai kebebasan pers pada era Jokowi?
3. Bagaimana pengalaman wartawan AJI dalam peliputan berita mengenai kebebasan pers era Jokowi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemahaman wartawan AJI mengenai kebebasan pers pada era Jokowi.
2. Mengetahui pemaknaan wartawan AJI mengenai kebebasan pers pada era Jokowi.
3. Mengetahui pengalaman wartawan AJI dalam peliputan berita mengenai kebebasan pers era Jokowi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna. Kegunaan penelitian ini dibagi dua, yakni kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Kedua kegunaan tersebut diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang jurnalistik. Selain itu, diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian tentang masalah yang serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi referensi bagi media, wartawan, dan mahasiswa jurnalistik untuk mengisi daftar kajian pers terkait kebebasan pers. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan agar wartawan lebih berhati-hati

dan adanya pembekalan setiap akan melakukan peliputan, terutama peliputan yang akan mengancam diri para jurnalis itu sendiri.

1.5 Landasan Pemikiran

Kajian pustaka dalam penelitian ini menjelaskan mengenai hasil penelitian sebelumnya dan landasan teoritis, diantaranya:

1.5.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mendapat rujukan pendukung serta pembanding yang menjadi penopang penelitian ini. Dengan penelitian yang serupa dan karya ilmiah sejenis yang telah ada, serta relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian yang dilakukan lebih jelas.

Yuliasih (2018) Sarjana Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul *Independensi Wartawan Media Online Dalam Reportase Reuni Aksi Damai 212 (Studi Fenomenologi pada Wartawan Detik.com)*. Metode yang digunakan yaitu fenomenologi Alfred Schutz dengan pendekatan kualitatif, dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemaknaan, pandangan, dan pengalaman wartawan Detik.com terkait peristiwa Aksi Damai 212. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Detik.com selalu menjaga akurasi, baik berita yang sifatnya pernyataan maupun yang sifatnya peristiwa. Dalam meliput peristiwa Reuni Aksi Damai berusaha menjaga independensi agar menghasilkan berita yang akurat. Wartawan Detik.com memaknai independensi sebagai suatu hal yang penting dalam menepis hambatan pada profesinya seperti pemberian amplop dari narasumber. Wartawan Detik.com memandang Aksi

sereminoal yang berjalan dengan damai meskipun diakui bahwa aksi tersebut bermuatan politik.

Eni Diana Sri Mulya (2017) Sarjana Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Kebebasan Wartawan di Tanah Papua (Studi Fenomenologi pada Wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam Peliputan Berita Di Papua). Metode yang digunakan yaitu fenomenologi dari Alfred Schutz (1959) dengan pendekatan kualitatif, dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui motif, pemahaman, dan pengalaman wartawan mengenai kebebasan wartawan di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kebebasan pers dalam peliputan berita di Papua, wartawan masih mendapatkan berbagai macam represi ketika peliputan berita dan kebebasan pers masih belum sesuai dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers.

Syukron Makmun (2015) Sarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Kajian Kebebasan Pers Dalam UU No 40 Tahun 1999. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif deskriptif dan tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh yang ada setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan menuju kebebasan pers yang sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999. Hambatan tersebut berasal dari masyarakat, pemerintah, bahkan dari insan pers itu sendiri. Setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers tidak semata-mata membawa pengaruh positif bagi pers nasional.

Reztya Ridwan (2015) Sarjana Ilmu Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Praktik Impunitas Dalam Kasus Pembunuhan Jurnalis Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia (Studi Kasus Upaya AJI Indonesia dalam Memperjuangkan Kasus Terbunuhnya Jurnalis RCTI Ersas Siregar Bagi Kebebasan Pers di Indonesia). Metode yang digunakan metode studi kasus model Robert K. Yin dengan penelitian kualitatif, dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kontribusi AJI Indonesia dalam memperjuangkan kasus terbunuhnya Ersas Siregar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AJI telah melakukan berbagai upaya baik melalui jalur Advokasi, kampanye, juga *lobby* dan negosiasi bersama pemerintah. Kendala utamanya yaitu ada pada persoalan advokasi yang sulit dituntaskan dikarenakan pemerintah khususnya Polri seperti sulit mengusut tersangka yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat.

Satrio Saptohadi (2014) Sarjana Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan judul Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pasang surutnya kebebasan pers di Indonesia dari masa ke masa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia yang mana lahirnya UU No. 40 tahun 1999 tentang pers yang dibuat oleh legislatif, dan penjurus ke sistem liberal.

Tabel 1.1 Daftar Penelitian sejenis

No	Nama/ Universitas	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi (Persamaan dan Perbedaan)
1.	Yuliasih, Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2018)	Independensi Wartawan Media Online Dalam Reportase Reuni Aksi Damai 212 (Studi Fenomenologi pada Wartawan Detik.com)	Kualitatif, Fenomenologi	Mengetahui pemaknaan, pandangan dan pengalaman wartawan Detik.com terkait peristiwa Aksi Damai 212.	Detik.com selalu menjaga akurasi, baik berita yang sifatnya pernyataan maupun yang sifatnya peristiwa. Dalam meliput peristiwa Reuni Aksi Damai berusaha menjaga independensi agar menghasilkan berita yang akurat. Wartawan Detik.com memaknai independensi sebagai suatu hal yang penting dalam menepis hambatan pada profesinya seperti pemberian amplop dari narasumber. Wartawan Detik.com memandang Aksi sereminoal yang berjalan dengan damai meskipun diakui bahwa aksi tersebut bermuatan politik.	Persamaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian fenomenologi pendekatan kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang membahas independensi media online dalam reportase reuni Aksi Damai 212 sedangkan penulis terkait kebebasan pers.
2.	Eni Diana Sri Mulya, Ilmu Komunikasi UIN	Kebebasan Wartawan di Tanah	Kualitatif, Fenomenologi	Mengetahui motif,	Tidak ada kebebasan pers dalam peliputan berita di	Persamaannya yaitu sama- sama menggunakan

	Sunan Gunung Djati Bandung (2017)	Papua (Studi Fenomenologi pada Wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam Peliputan Berita di Papua)	gi	pemahaman, pengalaman wartawan mengenai kebebasan wartawan di Papua.	Papua, wartawan masih mendapatkan berbagai macam represi ketika peliputan berita dan kebebasan pers masih belum sesuai dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers.	metode fenomenologi dan kualitatif dan sama-sama membahas mengenai kebebasan pers. Perbedaannya yaitu objek penelitiannya yang membahas kebebasan pers di tanah Papua dan subjek penelitiannya yang dilakukan pada AJI Indonesia.
3.	Syukron Makmun, Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Kajian Kebebasan Pers Dalam UU No 40 Tahun 1999	Yuridis normatif, deskriptif	Menganalisa pengaruh yang ada setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers	Dalam prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan menuju kebebasan pers yang sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999. Hambatan tersebut berasal dari masyarakat, pemerintah, bahkan dari insan per itu sendiri. Setelah disahkannya UU No 40 Tahun 1999 tentang pers tidak semata-mata membawa pengaruh positif bagi pers nasional.	Persamaannya adalah membahas mengenai kebebasan pers. Persamaannya ialah membahas mengenai kebebasan pers. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan dan objek penelitian yang dilakukan.
4.	Reztya Ridwan, Ilmu	Praktik Impunitas	Studi kasus	Mengetahui	AJI telah melakukan	Persamaannya yaitu sama-

	Komunikasi Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2015)	Dalam Kasus Pembunuhan Jurnalis Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia (Studi Kasus Upaya AJI Indonesia dalam Memperjuangkan Kasus Terbunuhnya Jurnalis RCTI Ersa Siregar Bagi Kebebasan Pers di Indonesia)	model Robert K. Yin, Kualitatif	bagaimana kontribusi AJI Indonesia dalam memperjuangkan kasus terbunuhnya Ersa Siregar.	berbagai upaya baik melalui jalur Advokasi, kampanye, juga <i>lobby</i> dan negosiasi bersama pemerintah. Kendala utamanya yaitu ada pada persoalan advokasi yang sulit dituntaskan dikarenakan pemerintah khususnya Polri seperti sulit mengusut tersangka yang merupakan anggota TNI Angkatan Darat.	sama menggunakan metode kualitatif dan membahas kebebasan pers. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan studi fenomenologi dan yang membedakannya dari permasalahan yang akan diteliti dan juga lokasi penelitian yang dilakukan.
5.	Satrio Saptohadi, Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman (2014)	Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia	Kualitatif, deskriptif	Mengetahui pasang surutnya kebebasan pers di Indonesia dari masa ke masa	Kebebasan pers di Indonesia yang mana lahirnya UU No. 40 tahun 1999 tentang pers yang dibuat oleh legislatif, dan penjurus ke sistem liberal.	Persamanya adalah metode yang digunakan kualitatif dan membahas kebebasan pers. Perbedaannya adalah penulis menggunakan studi fenomenologi, jika penelitian ini meneliti kebebasan pers di Indonesia dari masa ke masa, maka peneliti kali ini lebih spesifik yaitu kebebasan pers era Jokowi.

1.5.2 Landasan Teoritis

Teori yang akan dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini yaitu teori fenomenologi yang dilandasi oleh Max Weber. Pada penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz sebagai pijakan dalam menganalisa sebuah fenomena. Dalam (Kuswarno, 2009:1) “Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phainomai* yang berarti “menampak”. Dengan kata lain, fenomenologi mempelajari fenomena yang tampak di depan kita dan bagaimana penampakannya”. Fenomena tiada lain adalah fakta yang disadari, dan masuk ke dalam pemahaman manusia. Jadi suatu objek itu ada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya seperti tampak secara kasat mata, melainkan justru ada di depan kesadaran, dan disajikan dengan kesadaran pula. Berkaitan dengan hal ini, fenomenologi merefleksikan pengalaman manusia, sejauh pengalaman itu secara intensif berhubungan dengan suatu objek.

Seperti yang dikatakan Kuswarno (2009:2) fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting, dalam kerangka intersubjektivitas. Intersubjektif karena pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain di dalamnya. Tujuan utama fenomenologi adalah mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis.

Inti pemikiran Schutz menurut Kuswarno (2009:18) adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran. Proses penafsiran dapat digunakan untuk memperjelas atau memeriksa makna yang sesungguhnya, sehingga dapat memberikan konsep kepekaan yang implisit.

Bagi Schutz dalam Kuswarno (2009:17) tugas fenomenologi adalah menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan di mana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain mendasarkan tindakan sosial pada pengalaman, makna, dan kesadaran. Fenomenologi berdasarkan yang dikatakan Kuswarno (2009:22) mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran, studi yang mempelajari fenomena, cara kita mengalami sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman. Kenyatannya, fenomenologi lebih luas dari sekedar fenomena, yaitu pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama yang mengalaminya langsung.

Peneliti mendeskripsikan bahwa yang mengalami tindakan sosial, fenomena dan menjadi orang pertama yang mengalami secara langsung pada penelitian ini yaitu wartawan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung.

Schutz mengawali pemikirannya dengan mengatakan bahwa objek penelitian ilmu sosial pada dasarnya berhubungan dengan interpretasi terhadap realitas. Orang-orang saling terikat satu sama lain ketika membuat interpretasi ini. Peneliti harus menggunakan metode interpretasi yang sama dengan orang yang diamati, sehingga peneliti bisa masuk ke dalam dunia interpretasi orang yang dijadikan objek penelitian (Kuswarno, 2009:38). Disini peneliti harus bisa membangun komunikasi dan

interaksi yang baik berdasarkan ungkapan-ungkapan pengalaman personal para objek penelitian dengan tujuan memahami makna dari berbagai fenomena yang dialami oleh wartawan AJI.

Menurut Schutz dalam Sobur (2013:61) dirinya sudah menegaskan jika dunia sosial diinterpretasikan berdasarkan kategori-kategori akal sehat dan konstruksi-konstruksi yang kebanyakan berakar di dunia sosial. Konstruksi-konstruksi tersebut adalah sumber pelaku sosial yang menginterpretasikan berbagai situasi tindakan mereka, memahami maksud dan motivasi orang lain, mencapai pemahaman intersubjektif serta tindakan-tindakan yang terkoordinasikan dan yang lebih umum, menuntut jalannya dunia sosial. Schutz mengatakan, acuan kepada dunia sosial kehidupan sehari-hari dan pengalaman adalah satu-satunya jaminan tertinggi bahwa “dunia realitas sosial tidak akan pernah digantikan oleh dunia fiktif yang tidak ada yang diciptakan para penganut ilmiah”.

Ditinjau dari perspektif ini, dalam Sobur (2013:61) pengamat ilmiah berurusan dengan cara memaknai dan menjadikan dunia sosial bermakna. Fokus kajiannya dicurahkan pada cara anggota-anggota dunia sosial memahami dan menindaklanjuti objek pengalaman mereka seolah-olah objek pengalaman tersebut merupakan benda-benda yang berdiri sendiri dan terlepas dari diri mereka.

Teori fenomenologi Alfred Schutz, sama dengan yang ditulis Kuswarno (2009) “manusia senantiasa memiliki naluri untuk mengungkapkan sesuatu di balik dunia nyata, atau menginginkan sebuah ‘penampakan’ realitas yang jauh lebih dalam dari sekedar mengungkapkan realitas empiris secara artifisial melalui pancaindera”

maka penelitian ini akan menggali pemahaman, pemaknaan, dan juga pengalaman terhadap kebebasan pers pada era Jokowi.

1.5.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penjelasan mengenai beberapa konsep penting yang mendasari penelitian. Dengan adanya kerangka konseptual peneliti akan lebih mudah untuk mengetahui fenomena terkait kebebasan pers era Jokowi. Berikut penjelasannya:

1. Kebebasan Pers

Kata kemerdekaan menurut Mahi (2011:126) sebagaimana istilah yang digunakan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 untuk merujuk pada makna kebebasan pun ditegaskan dalam Undang-Undang HAM pasal 32, “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim dan kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebebasan pers di Indonesia lahir setelah Orde Baru tumbang pada 1998. Kebebasan pers ini kemudian ditegaskan lagi lewat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal-pasal yang menegaskan kemerdekaan, fungsi dan pentingnya pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- Pasal 2 : Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

- Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- Pasal 6 : Pers nasional melaksanakan peranannya:
 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan
 3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan
 5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Adapun Kemerdekaan pers diatur dalam:

- Pasal 4 ayat (1) : Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- Pasal 4 ayat (2) : Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- Pasal 4 ayat (3) : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

2. Perspektif

Menurut Fisher dalam Ardianto dan Qomaruzzaman (2016:75) menyatakan, pemahaman atas komunikasi manusia, merupakan masalah perspektif yang dipakai untuk memahaminya. Perspektif adalah sudut pandang dan cara pandang terhadap

sesuatu. Cara kita memandang atau pendekatan yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan akan menentukan pengetahuan yang kita peroleh.

3. Organisasi Wartawan

Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan, *Wartawan bebas memilih organisasi wartawan*. Saat ini terdapat berbagai organisasi wartawan yang menaungi pers wartawan. Standar organisasi wartawan telah disahkan dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 7/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 04-SK-DP/III/2006 tentang standar organisasi wartawan sebagai peraturan Dewan Pers tersebut dikatakan, “Organisasi wartawan memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan menjaga kemerdekaan pers sesuai amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers”

Sebagaimana yang dikatakan Susanto dkk (2010:85-86) untuk dapat melaksanakan mandat dan amanat tersebut, maka perlu dikembangkan organisasi wartawan yang memiliki integritas dan kredibilitas serta dengan anggota yang profesional dengan tujuan mengembangkan kemerdekaan pers yang professional, bebas, dan yang bertanggung jawab kepada publik.

1.6 Langkah-langkah Penelitian

Prosedur penelitian dapat dijelaskan seperti uraian pada bagian ini terdiri atas:

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di AJI Bandung, Jl. Cibeunying Permai V No.2 Cigadung, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40191. Alasan mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan AJI merupakan salah satu

organisasi wartawan yang peduli akan kebebasan pers yang menjadi pekerjaan rumah AJI sesuai visi dan misi yang diembannya, oleh karena itu peneliti memilih AJI karena kapabilitasnya dirasa cukup mumpuni.

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang sesuai dengan penelitian ini. Paradigma konstruktivisme ini bersifat subjektif, konstruktivisme menganggap manusia “bebas dan aktif dalam berperilaku dan memaknai realitas sosial” (Kriyantono, 2010: 55). Pemaknaan terhadap realitas yang dimaksud di sini adalah perspektif anggota AJI yang dibentuk dari pemahaman, pemaknaan dan pengalaman mereka tentang kebebasan pers era Jokowi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Seperti yang dikatakan Moleong (2006:6) pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan digunakan berbagai metode alamiah.

Peneliti mencoba memahami wartawan AJI Bandung terhadap kebebasan pers era Jokowi. Berangkat dari pemahaman, peneliti akan mengetahui proses munculnya makna dalam diri wartawan terhadap kebebasan pers yang kemudian dipahami melalui pengalaman yang dimiliki wartawan dalam kegiatan peliputan.

1.6.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi fenomenologi. Menurut Kuswarno (2013:35-36) fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang ditempelkan padanya. Dengan demikian, penelitian fenomenologi harus menunda proses penyimpulan mengenai sebuah fenomena. Jadi, mempertanyakan dan meneliti terlebih dahulu fenomena yang tampak, dengan mempertimbangkan aspek kesadaran yang ada padanya.

Kuswarno (2009:58) menyatakan bahwa penelitian fenomenologi pada dasarnya berprinsip *a priori*, sehingga tidak diawali dan didasari oleh teori tertentu. Penelitian fenomenologi justru berangkat dari perspektif filsafat, mengenai “apa” yang diamati, dan bagaimana cara mengamatinya. Adapun premis-premis dasar yang digunakan dalam penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut:

1. Sebuah peristiwa akan berarti bagi mereka yang mengalaminya secara langsung.
2. Pemahaman objektif dimediasi oleh pengalaman subjektif.
3. Pengalaman manusia terdapat dalam struktur pengalaman itu sendiri. Tidak dikonstruksi oleh peneliti.

Menurut Creswell dalam Kuswarno (2009:57) menjelaskan isu-isu prosedural dalam penelitian fenomenologi:

1. Peneliti harus memahami cara pandang filsafat terhadap fenomena/ realitas/ objek. Terutama pada kosep-konseps bagaimana individu mengalami dan memahami realitas. Epoche menjadi pusat paradigma, yaitu ketika peneliti

mengesampingkan perasaan dan prasangkanya, demi untuk memahami realitas melalui bahasa dan makna pada informan.

2. Peneliti bertanggung jawab untuk membuat pertanyaan penelitian yang berfungsi membongkar makna realitas dalam pemahaman informan. Pertanyaan penelitian juga harus mampu membuat informan menceritakan kembali kejadian yang sudah dialaminya, apa adanya (tanpa penambahan dan pengurangan).
3. Peneliti bertugas untuk mengumpulkan data dari orang yang mengalaminya secara langsung. Biasanya melalui wawancara dalam jangka waktu yang lama, dengan informan yang jumlahnya berkisar antara 5-25 orang. Peneliti diharuskan menggunakan refleksi diri dalam mengembangkan penjelasan yang artistik.
4. Mengikuti setiap tahapan-tahapan dalam proses analisis data.
5. Membuat laporan yang komprehensif mengenai makna dan esensi dari realitas

Penulis memilih metode ini dimaksudkan untuk mengetahui perspektif AJI Bandung mengenai pemahaman, pengalaman, dan pemaknaan terkait kebebasan pers pada era Jokowi dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif menurut Moleong (2010:3) yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan tanpa mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis.

Penelitian ini data yang akan dikumpulkan adalah hasil wawancara yang meliputi pandangan, pendapat, interpretasi, pengetahuan dan pengalaman yang dilakukan kepada AJI Bandung. Di dalamnya penulis menganalisis mengenai pemahaman, pemaknaan, dan pengalaman mengenai kebebasan pers era Jokowi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam peneliti ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah responden yang terlibat langsung dan memiliki data yang dibutuhkan, serta bersedia memberikan data secara langsung dan akurat. Responden yang dimaksud ialah wartawan AJI Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber berupa dokumen, buku, majalah dan sumber lain yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti memperoleh data sekunder melalui media elektronik seperti internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.5 Penentuan Informan

a. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung, dalam arti lain bergantung pada kapabilitas untuk dapat mengartikulasikan pengalamannya. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini ialah AJI Bandung.

b. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian fenomenologi tidak ditentukan. Menurut Kuswarno (2009:62) faktor terpenting memilih informan adalah karena diharapkan dapat menggambarkan makna dari fenomena atau peristiwa secara detail. Biasanya jumlah informan dalam penelitian fenomenologi 3 sampai dengan 10 orang dirasakan sudah cukup. Dalam penelitian ini peneliti memilih lima informan wartawan AJI Bandung.

Berikut adalah beberapa kriteria seperti yang disebutkan Kuswarno (2009:61) yang dapat dijadikan acuan dalam memilih informan dalam penelitian fenomenologi:

1. Informan harus mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan deskripsi dari sudut pandang orang pertama. Ini merupakan kriteria utama dan harus dalam penelitian metodologi. Walaupun secara demografis informan cocok, namun bila ia tidak mengalami secara langsung, ia tidak bisa dijadikan sebagai informan. Syarat inilah yang akan mendukung sifat otentitas penelitian fenomenologi.
2. Informan mampu menggambarkan kembali fenomena yang telah dialaminya, terutama dalam sifat alamiah dan maknanya. Hasilnya akan diperoleh data yang alami dan reflektif menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang mungkin membutuhkan waktu yang lama.
4. Bersedia untuk diwawancara dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau selama penelitian berlangsung.
5. Memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Kedua teknik tersebut dipandang tepat untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

a. Wawancara

Dalam bukunya Sugiyono (2017:137) mengatakan “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”.

Sedangkan menurut Hadi dalam Sugiyono (2017:138) mengemukakan bahwa, anggapan yang perlu dipegang peneliti dalam menggunakan metode wawancara diantaranya:

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Peneliti perlu melakukan teknik wawancara mendalam karena dinilai efektif untuk menggali informasi yang lengkap terkait kebebasan pers era Jokowi perspektif AJI Bandung. Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, informan dapat

dengan leluasa menjawab pertanyaan yang diajukan tanpa adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam mengeluarkan pendapatnya.

b. Observasi

Observasi digunakan untuk lebih memahami responden yang terpilih agar bisa memberikan pandangan yang maksimal dan baik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk menunjang penelitian. Menurut Kuswarno (2009:63) sumber-sumber rujukan bagi telah dokumen dalam penelitian ini di antaranya:

1. Abstrak disertasi, tesis, skripsi, karya ilmiah, atau hasil penelitian fenomenologi (sebaiknya) yang telah dipublikasikan.
2. Buku-buku referensi.
3. Orang yang ahli dalam permasalahan penelitian.
4. Perbincangan dengan dosen dan mahasiswa lain.
5. Dokumen-dokumen yang relevan, misalnya arsip pemerintah, kutipan peraturan, dsb.
6. Seminar atau pertemuan yang membahas topik yang relevan dengan permasalahan penelitian.
7. Jurnal-jurnal dan bahan tulisan yang lain, termasuk yang dipublikasikan melalui internet.

1.6.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Berikut adalah poin-poin lain dalam Kuswarno (2009:74-75) yang diajukan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data, dalam penelitian fenomenologi :

1. Konfirmasi kepada beberapa peneliti lain, terutama mereka yang meneliti pola-pola yang mirip.
2. Verifikasi data oleh pembaca naskah hasil penelitian (eureka factor), terutama dalam hal penjelasan logis, dan cocok tidaknya dengan peristiwa yang pernah dialami pembaca.
3. Analisis rasional dari pengenalan spontan, yaitu dengan menjawab pertanyaan berikut ini:
 - a. Apakah pola penjelasan cocok dan logis?
 - b. Apakah bisa digunakan untuk pola penjelasan yang lain?
4. Peneliti dapat menggolongkan data di bawah data yang sama/cocok .

1.6.8 Teknik Analisis Data

Menurut Kuswarno (2009:72-73) tahap yang akan dijalani dalam melakukan penelitian fenomenologi dengan membuat simpulan, dampak dan manfaat penelitian dilakukan sebagai berikut:

1. Membuat ringkasan dan ikhtisar dari keseluruhan penelitian.
2. Menegaskan hasil penelitian dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan, dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.
3. Menjelaskan hasil penelitian dengan kemungkinan penelitian lanjutannya.
4. Menghubungkan hasil penelitian dengan kegunaan penelitian.

5. Menghubungkan hasil penelitian dengan profesi peneliti.
6. Menghubungkan hasil penelitian dengan makna-makna dan relevansi sosial.
7. Menutup penjelasan dengan menawarkan tujuan dan arah penelitian selanjutnya.

Adapun menurut Creswell dalam Kuswarno (2009:71) bahwa dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Traditions*, mengemukakan teknik analisis dan representasi data yang agak berbeda untuk penelitian fenomenologi. Berikut adalah pemikiran Creswell.

Tabel 1.2
Analisis Data Penelitian Fenomenologi

Analisis dan Representasi Data	Penelitian Fenomenologi
Pengolahan data	Membuat dan Mengorganisasikan data
Membaca dan mengingat data	Membaca teks, membuat batasan-batasan catatan, dan membuat <i>form</i> kode-kode inisial
Menggambarkan data	Menggambarkan makna dari peristiwa untuk peneliti
Mengklasifikasikan data	<ul style="list-style-type: none"> • Menemukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, dan membuat daftarnya • Mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan yang sama ke dalam unit-unit makna tertentu
Interpretasi data	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun deskripsi tekstural (apa yang terjadi) • Membangun deskripsi structural (bagaimana peristiwa itu dialami). • Membangun deskripsi keseluruhan dari peristiwa (esensi peristiwa)
Visualisasi dan presantasi data	Narasi esensi peristiwa, dilengkapi dengan tabel pernyataan, dan unit-unit makna



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG